

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

a. Latar Belakang

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BPPP Bitung didirikan pada tahun 1974 dengan nama Training Center (TC) Perikanan. Kemudian pada tahun 1975, TC Perikanan diubah namanya menjadi Pangkalan Pengembangan Pola Keterampilan Penangkapan Perairan Pantai (P3KP3) Aertembaga. Pada tahun 1978 namanya diubah kembali menjadi Balai Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Aertembaga, dan sejak tahun 2001 nama BKPI Bitung diubah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Aertembaga serta pada Tahun 30 Maret 2017 melalui Permen KP No. 27/PERMEN- KP/ 2017 NOMENKLATUR Balai resmi berubah menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung.

Entitas berkedudukan di Jalan Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Selama kurun waktu 42 tahun BPPP Bitung telah 11 (sebelas) kali berganti pemimpin.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi, maka BPPP Bitung menyusun visi yang menunjukkan jati diri dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yaitu “Terwujudnya

Sumberdaya Manusia Perikanan yang Terampil dan Mampu Mengelola Usaha Perikanan”. Adapun rumusan Misi BPPP Bitung sebagai berikut :

1. Mengembangkan pelaksanaan diklat yang profesional dan berkualitas.
2. Mengembangkan aparatur Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung menuju profesionalisme sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Mengembangkan pelatihan sesuai dengan pangsa pasar.
4. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan instansi lain baik pemerintah maupun swasta.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kemajuan teknologi.
6. Menata lingkungan kampus yang bersih, indah dan amanologi.

Sebagai salah satu UPT dari BPPSDM Kelautan dan Perikanan, BPPP Bitung memiliki tugas untuk “Melaksanakan Penyusunan Bahan Kebijakan, Program dan Anggaran, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan dan Penyuluhan di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya BPPP Bitung memegang fungsi sebagai Perencanaan kegiatan pelatihan teknis dan manajerial dibidang kelautan dan perikanan, penyusunan materi metodologi dan penyelenggaraan penyuluh perikanan sesuai kondisi wilayah, pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang kelautan dan perikanan, pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Wilayah pengembangan BPPP Bitung meliputi 7 (tujuh) Provinsi dengan 79 Kabupaten / Kota, yaitu :

1. Provinsi Sulawesi Utara : 4 Kota dan 11 Kabupaten
2. Provinsi Gorontalo: 1 Kota dan 5 Kabupaten

3. Provinsi Sulawesi Tengah: 1 Kota dan 12 Kabupaten
4. Provinsi Sulawesi Selatan : 3 Kota dan 21 Kabupaten
5. Provinsi Kalimantan Timur : 3 Kota dan 7 Kabupaten
6. Provinsi Kalimantan Utara : 1 Kota dan 4 Kabupaten
7. Provinsi Sulawesi Barat : 6 Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPPP dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas masing-masing, sebagai berikut :

a. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan;

b. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Bitung sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Jumlah keseluruhan pegawai BPPP Bitung sampai dengan 30 Juni 2024 sebanyak 437 orang, terdiri dari PNS 258 orang, 38 orang PPPK, 86 orang Penyuluh Perikanan Bantu, PPNPN 2 orang dan tenaga kontrak 16 orang. PNS BPPP Bitung berdasarkan golongan disajikan berikut ini :

PNS BPPP Bitung berdasarkan Golongan

No.	Uraia	Jumla
1	Golongan II	72
2	Golongan III	17
3	Golongan IV	31
	Jumlah	27

PNS BPPP Bitung berdasarkan tingkat Pendidikan

disajikan berikut ini :

**Tabel 2. PNS BPPP Bitung
berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat	Jumlah
1	SLTA	36
2	D3	63
3	S1	14
4	D4	19
5	S2	13
	Jumlah	27

BPPP Bitung memiliki 6 (enam) jabatan fungsional yang siap memberikan bimbingan dan pelatihan dibidang kelautan dan perikanan.

Kelima jabatan fungsional tersebut yaitu :

- Jabatan Fungsional Instruktur
- Jabatan Fungsional Widyaiswara
- Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
- Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan
- Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
- Jabatan Fungsional Perencana

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Unaudited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelatihan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan

operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Seiring dengan pelaksanaan roll out SAKTI full module untuk seluruh K/L pada Tahun 2025, maka pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul General Ledger dan Pelaporan/GLP).

Sesuai dengan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016. Dengan penerapan SAKTI full module maka proses bisnis rekonsiliasi mulai Tahun 2022 perlu disesuaikan, yaitu Aplikasi e-Rekon&LK tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI dengan alamat website <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar**Pengukuran***A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata

uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan- LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak

berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.+

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(2) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar

atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali

transaksi berlangsung.

Ekuitas

(3) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(4) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan per 31 Desember 2025, Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31 DESEMBER 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	188.600.000	188.600.000
		-
Jumlah Pendapatan	188.600.000	188.600.000
Belanja	-	-
Belanja Pegawai	41.811.227.000	48.265.163.000
Belanja Barang	9.314.323.000	4.727.061.000
Belanja Bantuan Sosial		
Belanja Modal	35.000.000	35.000.000
Jumlah Belanja	51.160.550.000	53.027.224.000

Dalam Kegiatan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sampai 31 Desember 2025 telah melakukan Revisi Anggaran, seperti :

- Revisi ke-1 (DJA) tanggal 21 Februari 2025, tentang Adanya Efisiensi anggaran sebesar Rp6.495.227.000 dengan rincian blokir setiap RO :
 - DCC 431 Rp18.000.000,00
 - RAL 711 Rp35.000.000,00
 - SCC 831 Rp3.095.260.000,00
 - QDD 646 Rp1.237.645.000,00
 - EBA 962 Rp58.160.000,00
 - EBA 994.002 Rp1.961.162.000,00
 - EBD 952 Rp40.000.000,00
 - EBD 953 Rp30.000.000,00

- Revisi ke-1 (DJA) tanggal 22 Februari 2025, tentang Adanya Efisiensi anggaran sebesar Rp6.495.227.000 dengan rincian blokir setiap RO :
 - DCC 431 Rp18.000.000,00
 - RAL 711 Rp35.000.000,00
 - SCC 831 Rp3.095.260.000,00
 - QDD 646 Rp1.237.645.000,00
 - EBA 962 Rp58.160.000,00
 - EBA 994.002 Rp1.961.162.000,00
 - EBD 952 Rp40.000.000,00
 - EBD 953 Rp30.000.000,00
- Revisi ke-1 (DJA) tanggal 23 Februari 2025, tentang Adanya Efisiensi anggaran sebesar Rp6.495.227.000 dengan rincian blokir setiap RO :
 - DCC 431 Rp18.000.000,00
 - RAL 711 Rp35.000.000,00
 - SCC 831 Rp3.095.260.000,00
 - QDD 646 Rp1.237.645.000,00
 - EBA 962 Rp58.160.000,00
 - EBA 994.002 Rp1.961.162.000,00
 - EBD 952 Rp40.000.000,00
 - EBD 953 Rp30.000.000,00
- Revisi ke-4 tanggal 23 April 2025, tentang Revisi penarikan dana (halaman III DIPA) Kanwil DJPB
- Revisi ke-5 tanggal 25 Juni 2025, tentang Revisi penarikan dana (halaman III DIPA) Kanwil DJPB
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2025 Revisi ke-6, tanggal 15 Juli 2025, tentang Revisi penyesuaian RPD (Kanwil DJPB) dengan rincian blokir per RO :
 - DCC.431 Rp18.000.000,00
 - RAL.711 Rp35.000.000,00
 - SCC.831 Rp3.095.260.000,00

*Realisasi Pendapatan
Rp90.412.189,00*

- QDD.646 Rp11.763.000,00
- EBA.962 Rp58.160.000,00
- EBA.994.002 Rp1.559.595.000,00
- EBD.952 Rp40.000.000,00
- EBD.953 Rp30.000.000,00
- EBD.955 Rp20.000.000,00
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2025 Revisi ke-7, tanggal 1 September 2025, tentang Revisi DJA (Pengurangan pagu-Drop blokir) dengan rincian blokir per RO :
 - RAL.711 Rp35.000.000,00
 - SCC.831 Rp90.874.000,00
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2025 Revisi ke-8, tanggal 10 Oktober 2025, tentang Revisi penyesuaian pagu belanja pegawai (PPPK) khususnya pada uang makan dan tunjangan kinerja (Kanwil DJPB) dengan rincian blokir per RO :
 - RAL.711 Rp35.000.000,00
 - SCC.831 Rp90.874.000,00
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2025 Revisi ke-9, tanggal 14 November 2025, tentang Revisi penyesuaian halaman III DIPA dengan rincian blokir per RO :
 - RAL.711 Rp35.000.000,00
 - SCC.831 Rp90.874.000,00
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2025 Revisi ke-10, tanggal 19 November 2025, tentang Revisi DJA :
 - Pemenuhan kebutuhan belanja pegawai Rp6.453.936.000,00
 - Pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran Rp249.242.000,00 (termasuk penyediaan honor PPPK Paruh Waktu)
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2025 Revisi ke-11, tanggal 10 Desember 2025, tentang Revisi penyesuaian dan optimalisasi sisa anggaran kegiatan (KPA)

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp233.678.011,00 atau mencapai 123.9 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp188.600,00. Pendapatan Satuan kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung terdiri dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya; Pendapatan sewa Tanah Gedung dan Bangunan; Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai TUSI; Pendapatan jasa Pelabuhan Perikanan; Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Realisasi Pendapatan		
	Pendapatan	Realisasi	% Real Pendapatan
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	88.000.000	15.129.000	17.19
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan mesin		8.820.000	
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya		539.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	18.500.000	43.941.000	237.52
Pendapatan Penggunaan SaranadanPrasarana sesuai dengan TUSI	32.600.000	72.452.390	
Jumlah Penerimaan	139.100.000	140.881.390	97.83
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	49.500.000	63.170.000	127.62
Jumlah Pendapatan			
Pendapatan Jasa pelabuhan Perikanan	-	-	
Jumlah Pendapatan	49.500.000	63.170.000	127.62
Pendapatan lain- Lain			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		29.626.621	
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	0	
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL		0	
Jumlah Pendapatan		29.626.621	0
Jumlah Keseluruhan Pendapatan	188.600.000	233.678.011	123.09.00

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 senilai Rp233.678.011,00 pada Satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung yaitu :

▪ **Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya senilai Rp15.129.000,00, sebagai berikut;**

- Hasil Sampling Kegiatan workshop budidaya berupa penjualan ikan nila senilai Rp1.729.000,00
- Hasil sampling kegiatan workshop budidaya berupa ikan lele senilai Rp2.070.000,00
- Hasil sampling workshop budidaya berupa udang vaname senilai Rp11.330.000,00

▪ **Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya senilai Rp539.000,00, sebagai berikut:**

- Hasil sampling Workshop PHP berupa nugget ikan senilai Rp539.000,00

• **Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp43.941.000,00**

- xSewa food court/ kantin untuk tahun 2025 senilai Rp654.000,00
- Sewa Koperasi/ kios tahun 2025 senilai Rp10.033.000,00
- Sewa kamar asrama kegiatan pesantren kilat SMAN 1 Bitung senilai Rp5.152.000,00
- Sewa Café Bobara keegiatan MILAD IGRA senilai Rp855.000,00
- Sewa dermaga oleh PT. Pathemang Raya senilai Rp27.247.000,00

• **Pendapatan Penggunaan Sarana Prasarana sesuai dengan TUSI senilai Rp72.452.390,00, sebagai berikut :**

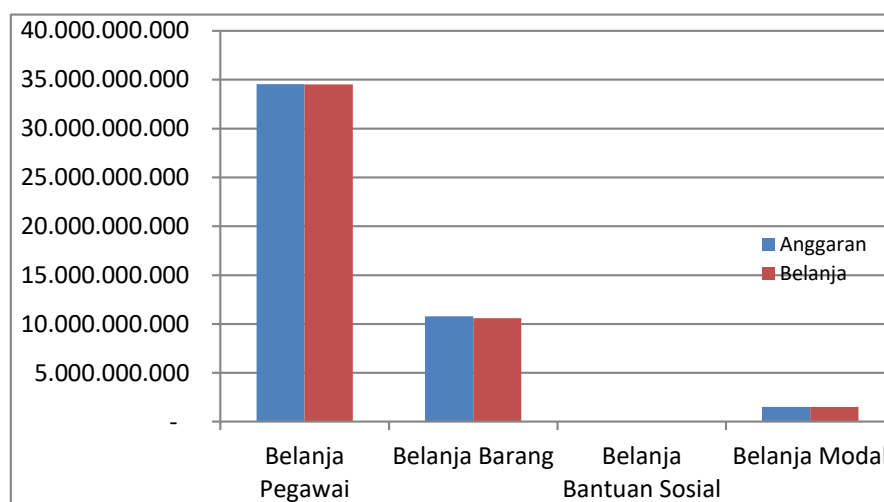
- Sewa rumah dinas (Potongan SPM Mei s.d. Juni 2025) senilai Rp4.106.356,00
- Sewa kamar asrama peserta Pelatihan BSTF senilai 2.400.000,00
- Sewa asrama kegiatan BSTF II DKP Kutai Timur senilai Rp9.600.000,00
- Sewa kamar asrama calon Taruna Poltek KP Bitung

senilai Rp2.080.000,00

- Sewa kamar asrama dan ruang kelas kegiatan Pelatihan dari Mimika senilai Rp7.120.000,00
- Sewa kamar asrama peserta pelatihan SKN dan BST-F II senilai Rp9.600.000,00
- Sewa kamar asrama mahasiswa Polnustar (pelatihan Pembenihan) senilai Rp480.000,00
- Sewa kamar asrama kegiatan pelatihan penangkapan ikan ramah lingkungan senilai Rp12.000.000,00
- Karcis masuk eduwisata kunjungan RA Al Khairaat senilai Rp450.000,00
- Karcis masuk eduwisata kunjungan RA Al Hijrah senilai Rp450.000,00
- Karcis masuk eduwisata pertemuan Coral Sulut senilai Rp500.000,00
- Karcis masuk eduwisata kunjungan sekolah Dian Harapan senilai Rp570.000,00
- Karcis masuk kunjungan sekolah MI Al Muhtadin senilai Rp245.000,00
- Karcis masuk kunjungan siswa pondok pesantren Assalam Manado senilai Rp750.000,00
- Karcis masuk kunjungan prodi budidaya perairan Unsrat Manado senilai Rp300.000,00
- Pelayanan Bengkel (pekerjaan Pembuatan dudukan kompor) senilai Rp286.500,00
- Pelayanan Bengkel (pekerjaan Pembuatan pintu pagar) senilai Rp623.000,00
- Pelayanan Bengkel (pekerjaan Pembuatan dudukan kompor seribu sumbu) senilai Rp191.000,00
- Pelayanan Bengkel (pekerjaan Pembuatan bakar-bakar ikan sate) senilai Rp312.000,00
- Pelayanan Bengkel (pekerjaan Pembuatan dudukan tong air) senilai Rp109.000,00

- **Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin**
 - Lelang Genset (KPKNL Manado) senilai Rp8.820.000,00
- **Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp29.626.621, sebagai berikut:**
 - Pengembalian kelebihan bayar Uang Makan bulan November 2024 senilai Rp15.892.200,00
 - Pengembalian kelebihan bayar Tunjangan Kinerja Desember 2024 senilai Rp13.549.241,00
 - Pengembalian belanja pegawai TAYL (kekurangan gaji an. Fadhila Yahya,dkk) lewat potongan SPM senilai Rp185.180,00.
- **Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan senilai Rp63.170.000,00**
 - Pelatihan dan Uji Kompetensi pelatihan pembenihan ikan nila senilai Rp3.770.000,00
 - Pelatihan alat penangkapan ikan ramah lingkungan senilai Rp49.500.000,00
 - Pelatihan pembenihan ikan nila senilai Rp9.900.000,00

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami Penurunan dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi belanja Pegawai tahun 2025 mengalami penurunan karena adanya Penyuluh Perikanan yang meninggal an. Romy Tompodung dan Penyuluh perikanan yang pindah an. Nina wulandari
2. Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 lebih Kecil dari realisasi belanja barang tahun 2024

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	47.757.970.908	47.822.555.391	(0,14)
Belanja Barang	4.614.245.632	14.542.982.367	(68,27)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	651.697.790	(100,00)
Jumlah	52.372.216.540	63.017.235.548	(16,89)

Belanja Pegawai

Rp47.757.970.908,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 adalah masing-masing senilai Rp47.757.970.908,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 31 Desember 2025 mengalami Penurunan.

Perbandingan Belanja Pegawai
TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	13.633.230.540	14.093.320.600	(3,26)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	194.340	213.931	(9,16)
Bel. Tunj. Suami/ istri PNS	917.066.130	933.919.810	(1,80)
Bel. Tunj. Anak	274.995.204	275.572.862	(0,21)
Bel. Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-
Bel. Tunj. Fungsional PNS	2.450.242.000	2.558.878.000	(4,25)
Bel Tunj. PPh PNS	154.842.356	164.858.908	(6,08)
Bel. Tunj. Beras PNS	702.111.900	725.069.040	(3,17)
Bel. Uang Makan PNS	2.160.807.000	2.240.417.000	(3,55)
Bel. Tunj. Umum PNS	45.520.000	49.700.000	(8,41)
Bel. Pegawai (Tunj. Profesi Dosen)	0	0	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	2.536.802.100	2.122.955.600	19,49
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	46.455	41.586	11,71
Bel. Tunj. Suami/ istri PPPK	141.888.920	130.796.720	8,48
Bel. Tunj. Anak PPPK	41.865.640	34.980.128	19,68
Bel. Tunj. Fungsional PPPK	395.220.000	342.360.000	15,44
Bel. Tunj. Beras PPPK	137.815.260	117.537.660	17,25
Bel. Uang Makan PPPK	525.240.000	373.683.000	40,56
Bel. Tunj. Umum PPPK	2.205.000		-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan)	20.102.574.806	20.853.241.548	(3,60)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan/Kinerja PPPK)	3.512.723.535	2.784.818.863	26,14
Jumlah	47.760.591.186	47.827.565.256	(0,14)
Pengembalian Belanja	2.620.278	5.009.865	(47,70)
Jumlah	47.757.970.908	47.822.555.391	(0,14)

Dalam Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 terdapat Pengembalian Belanja pada satuan kerja Balai Pelatihan dan penyuluhan Perikanan Bitung senilai Rp2.620.278,00. yaitu:

- Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS senilai Rp1.424,00.
- Pengembalian Uang Makan PNS senilai Rp2.577.000,00

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp4.614.245.632,00

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 adalah masing-masing senilai Rp4.614.245.632,00. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami Penurunan dari Realisasi Belanja Barang TA 2024, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dalam mengelola keuangan negara sesuai Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025.

Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan perkantoran	165.134.801	1.126.604.574	(85,34)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.535.600	7.398.000	(65,73)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	124.080.000	125.880.000	(1,43)
Belanja Barang Operasional Lainnya	162.097.836	276.851.978	(41,45)
Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid 19 (521131)	-	-	
Belanja Bahan	100.561.733	2.258.284.515	(95,55)
Belanja Honor Output Kegiatan	2.221.200.000	3.138.887.000	(29,24)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	166.295.350	2.283.851.858	(92,72)
Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi	0	3.768.750	(100,00)
Belanja Langganan Listrik	193.962.792	228.862.967	(15,25)
Belanja Langganan Telepon	7.166.298	21.552.155	(66,75)
Belanja Langganan Daya dan Jasa lainnya	84.074.443	82.079.849	2,43
Belanja Sewa	0	190.315.000	(100,00)
Belanja Jasa Protesi	0	65.600.000	(100,00)
Belanja Jasa Lainnya	891.233.360	60.584.200	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	293.358.290	664.215.163	(55,83)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	158.769.768	326.436.865	(51,36)
Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.915.780	196.648.427	(96,99)
Belanja Perjalanan Biasa	45.715.581	2.113.377.161	(97,84)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	24.480.000	(100,00)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1.348.700.745	-
Jumlah	4.622.101.632	14.546.379.207	(68,23)
Pengembalian Belanja	7.856.000	-3396840	131,27
Jumlah Netto	4.614.245.632	14.542.982.367	(68,27)

Terdapat Pengembalian Belanja senilai Rp7.856.000,00 yaitu:

- Pengembalian Belanja Honor output kegiatan senilai Rp5.000.000,00
- Pengembalian Belanja Jasa Lainnya senilai Rp2.856.000,00

B.5. Belanja Modal

Dalam Tahun 2025 Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung per 31 Desember 2025 tidak terdapat Belanja Modal.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 adalah masing-masing senilai Rp.0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	Naik (Turun) %
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja
Modal Peralatan dan
Mesin
Rp0,00

Tidak terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0.00

Tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp.0.00.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal
Lainnya Rp.0

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 adalah masing-masing senilai Rp0.00

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan
Sosial Rp0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 masing-masing senilai Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah masing-masing senilai Rp0.00 Saldo Kas ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di bendahara pengeluaran	-	-
Kas di bendahara pengeluaran TUP	-	-
Jumlah	-	-

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp.0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp.0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00*

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	-	-
		-
Jumlah	-	-

Piutang PNPB

Rp23.080.958,00

C.4. Piutang PNPB

Saldo Piutang PNPB per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah senilai Rp23.080.958,00 dan Rp29.441.441,00. Piutang PNPB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNPB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNPB

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Bukan Pajak	23.080.958	29.441.441
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	23.080.958	29.441.441

Piutang Bukan Pajak senilai Rp23.080.958,00, terdiri atas:

- Pengembalian Uang Makan Desember 2025 senilai Rp8.382.000,00
- Pengembalian Tunjangan Kinerja Rp14.698.958,00.

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada 31 Desember 2025 adalah masing-masing senilai Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024

No	Nama	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 masing-masing adalah senilai Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lainnya
(Rp0,00)*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak pada Satuan Kerja Balai Pelatihan dan penyuluhan Perikanan Bitung senilai (Rp0,00).

C.8. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka Rp0*

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 masing-masing adalah senilai Rp.0 dan Rp.0 Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0,00*

C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 masing-masing adalah senilai Rp.0,00.

C.10. Persediaan

Persediaan Rp0,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp344.000,0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual,

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	-	344.000
Bahan Baku	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	-	344.000

Nilai Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp0.00,

C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Tagihan
TP/TGR
Rp0.00*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 masing-masing senilai Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12. Tagihan Penjualan Angsuran

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0.00*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 masing-masing senilai Rp.0 Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp. 0.00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah masing-masing senilai Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

31 Desember 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.14. Tanah

Tanah
Rp47.242.271.000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp47.242.271.000,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	47.242.271.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Jumlah	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2025	47.242.271.000

Rincian Kepemilikan Tanah pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas/ m2	Lokasi	Nilai
1	70.000	Jl. Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua	24.421.147.000
2	14.390	Jl. Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua	6.444.986.000
3	25.400	Jl. Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua	11.376.138.000
4			-
Jumlah			42.242.271.000

Ketiga Tanah ini telah dikeluarkan Penetapan Status Penggunaan BMN pada kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nomor :133/KM.6/WKN.16/2017 tanggal 28 November 2017.

C.15. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp18.003.328.552,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp18.003.328.552,00 dan Rp21.579.433.273,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	21.579.433.273
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	1.606.668.400
Pembelian	0
Koreksi tambah	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Jumlah	23.186.101.673
Mutasi Kurang	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset lainnya	5.182.773.121
Saldo per 31 Desember 2025	18.003.328.552
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	17.260.481.057
Nilai Buku per 31 Desember 2025	742.847.495

Pada Peralatan dan mesin Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung yang sudah dilakukan Penetapan Status senilai Rp21.768.238.730,00.

C.16. Gedung dan Bangunan

Realisasi Gedung dan
Bangunan

Rp20.730.038.695,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp20.730.038.695,00 dan senilai Rp20.555.038.695,00 .

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada laporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	20.555.038.695
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	-
Penerimaan Aset	175.000.000
Pengembangan Nilai Aset	-
Jumlah Mutasi Tambah	20.730.038.695
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/ Kuantitas	-
Reklasifikasi Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2025	20.730.038.695
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(4.574.985.653)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	16.155.053.042

Pada Gedung dan Bangunan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung yang sudah dilakukan Penetapan Status senilai Rp20.555.038.695,00.

C.17. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan dan
Irigasi

Rp24.609.036.500,00

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 senilai Rp24.609.036.500,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	24.548.036.500
Mutasi tambah:	
Hibah	61.000.000
Koreksi Kesalahan input IP (Irigasi)	0
Saldo Awal (Irigasi)	0
Jumlah	24.609.036.500
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	-
Reklasifikasi keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	24.609.036.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-23.151.986.464
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.457.050.036

Pada Jalan, Irigasi dan Jaringan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan senilai Rp2.881.486.500,00.

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp54.652.000,00*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp54.652.000,00.

Aset ini meliputi :

- Buku Rp.54.652.000,00

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00*

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak terdapat Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 senilai Rp0.00.

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp44.987.453.174, 00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah (Rp44.987.453.174,00) dan (Rp46.940.775.000,00).

Akumulasi Penyusutan ini meliputi :

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp17.260.481.057,00
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp4.574.985.653,00
3. Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Rp22.694.961.787,00
4. Akumulasi Penyusutan Irigasi Rp313.862.890,00
5. Akumulasi Penyusutan Jaringan Rp143.161.787,00.

C.21. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp0,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain
Rp3.486.854.721,0
0

C.22. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah Rp3.486.854.721,00 dan Rp0,00. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- penghentian aset dari penggunaan	3.486.854.721
Saldo per 31 Desember 2025	3.486.854.721
Akumulasi Penyusutan	3.473.834.724
Nilai Buku per 31 Desember 2025	6.960.689.445

C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(Rp3.473.834.724,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah (Rp3.473.834.724,00) dan (Rp0,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	
Aset Lain-lain	3.473.834.724	3.473.834.724	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	3.473.834.724	3.473.834.724	0

C.24. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp25.567.996,00.

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp25.567.996,00 dan Rp22.792.396,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Listrik, Telepon, Internet bulan Desember 2025	25.567.996	Pembayaran Belanja Listrik, Telepon dan Internet
0	-	
Jumlah	25.567.996	

Utang yang belum ditagihkan Rp0,00

C.26. Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan pada Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00.

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Jumlah	-	

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0,00

C.27. Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2025.

C.28. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp.0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 senilai Rp0.00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.29. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0.00

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00, Beban ini merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.30. Ekuitas

Ekuitas

Rp65.662.291.127,00

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp65.662.291.127,00 dan Rp67.054.502.306,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp195.231.390,00*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp195.231.390,00 dan Rp551.156.607,00 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	15.129.000	182.696.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	539.000	2.970.500
Pend sewa Tanah, gedung bangunan	43.941.000	48.850.107
PendapatanPengunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI	72.452.390	78.890.000
Pendapatan Biaya Pendidikan	63.170.000	237.750.000
JUMLAH	195.231.390	551.156.607

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 senilai Rp195.231.390,00 pada Satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung yaitu :

- **Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya senilai Rp15.129.000,00, sebagai berikut;**
 - Hasil Sampling Kegiatan workshop budidaya berupa penjualan ikan nila senilai Rp1.729.000,00
 - Hasil sampling kegiatan workshop budidaya berupa ikan lele senilai Rp2.070.000,00
 - Hasil sampling workshop budidaya berupa udang vaname senilai Rp11.330.000,00
- **Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya senilai Rp539.000,00, sebagai berikut:**
 - Hasil sampling Workshop PHP berupa nugget ikan senilai Rp539.000,00

- **Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp43.941.000,00**

- Sewa food court/ kantin untuk tahun 2025 senilai Rp654.000,00
- Sewa Koperasi/ kios tahun 2025 senilai Rp10.033.000,00
- Sewa kamar asrama kegiatan pesantren kilat SMAN 1 Bitung senilai Rp5.152.000,00
- Sewa Café Bobara keegiatan MILAD IGRA senilai Rp855.000,00
- Sewa dermaga oleh PT. Pathemang Raya senilai Rp27.247.000,00

- **Pendapatan Penggunaan Sarana Prasarana sesuai dengan TUSI senilai Rp72.452.390,00, sebagai berikut :**

- Sewa rumah dinas (Potongan SPM Mei s.d. Juni 2025) senilai Rp4.106.356,00
- Sewa kamar asrama peserta Pelatihan BSTF senilai 2.400.000,00
- Sewa asrama kegiatan BSTF II DKP Kutai Timur senilai Rp9.600.000,00
- Sewa kamar asrama calon Taruna Poltek KP Bitung senilai Rp2.080.000,00
- Sewa kamar asrama dan ruang kelas kegiatan Pelatihan dari Mimika senilai Rp7.120.000,00
- Sewa kamar asrama peserta pelatihan SKN dan BST-F II senilai Rp9.600.000,00
- Sewa kamar asrama mahasiswa Polnustar (pelatihan Pembenihan) senilai Rp480.000,00
- Sewa kamar asrama kegiatan pelatihan penangkapan ikan ramah lingkungan senilai Rp12.000.000,00
- Karcis masuk eduwisata kunjungan RA Al Khairaat senilai Rp450.000,00

- Karcis masuk eduwisata kunjungan RA Al Hijrah senilai Rp450.000,00
- Karcis masuk eduwisata pertemuan Coral Sulut senilai Rp500.000,00
- Karcis masuk eduwisata kunjungan sekolah Dian Harapan senilai Rp570.000,00
- Karcis masuk kunjungan sekolah MI Al Muhtadin senilai Rp245.000,00
- Karcis masuk kunjungan siswa pondok pesantren Assalam Manado senilai Rp750.000,00
- Karcis masuk kunjungan prodi budidaya perairan Unsrat Manado senilai Rp300.000,00
- Pelayanan Bengkel (pekerjaan Pembuatan dudukan kompor) senilai Rp286.500,00
- Pelayanan Bengkel (pekerjaan Pembuatan pintu pagar) senilai Rp623.000,00
- Pelayanan Bengkel (pekerjaan Pembuatan dudukan kompor seribu sumbu) senilai Rp191.000,00
- Pelayanan Bengkel (pekerjaan Pembuatan bakar-bakar ikan sate) senilai Rp312.000,00
- Pelayanan Bengkel (pekerjaan Pembuatan dudukan tong air) senilai Rp109.000,00
- **Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin**
 - Lelang Genset (KPKNL Manado) senilai Rp8.820.000,00
- **Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan senilai Rp63.170.000,00**
 - Pelatihan dan Uji Kompetensi pelatihan pembenihan ikan nila senilai Rp3.770.000,00
 - Pelatihan alat penangkapan ikan ramah lingkungan senilai Rp49.500.000,00

- Pelatihan pembenihan ikan nila senilai Rp9.900.000,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024
Rp47.734.889.950,00 senilai R47.734.889.950,00 dan Rp47.793.113.950,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	13.633.230.540	14.093.320.600	(3,26)
Beban Pembulatan Gaji PNS	192.916	207.079	(6,84)
Beban Tunj. Suami/ istri PNS	917.066.130	933.919.810	(1,80)
Beban Tunj. Anak PNS	274.995.204	275.572.862	(0,21)
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.450.242.000	2.558.878.000	(4,25)
Beban Tunj. PPh PNS	154.842.356	164.858.908	(6,08)
Beban Tunj. Beras PNS	702.111.900	725.069.040	(3,17)
Beban Uang Makan PNS	2.149.848.000	2.224.362.800	(3,35)
Beban Tunj. Umum PNS	45.520.000	48.034.159	(5,23)
Beban Pegawai	0		
Beban Gaji Pokok PPPK	2.536.802.100	2.122.955.600	19,49
Beban Pembulatan Gaji PPPK	46.455	41.586	11,71
Beban Tunj. Suami/ istri PPPK	141.888.920	130.796.720	8,48
Beban Tunj. Anak PPPK	41.865.640	34.980.128	19,68
Beban Tunj. Fungsional PPPK	395.220.000	342.360.000	15,44
Beban Tunj. Beras PPPK	137.815.260	117.537.660	17,25
Beban Uang Makan PPPK	525.240.000	373.683.000	40,56
Beban Tunj. Umum PPPK	2.205.000		-
Beban Uang Lembur			-
Beban Tunjangan Profesi Dosen			-
Beban Pegawai (Tunj Khusus/	20.087.833.994	20.836.517.135	(3,59)
Beban Pegawai (Tunj Khusus/	3.512.723.535	2.784.818.863	26,14
Jumlah	47.734.889.950	47.793.113.950	(0,12)

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp. 344.000,00*

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp344.000,00 dan Rp3.529.710,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	344.000	3.529.710	(90,25)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	
Beban Persediaan Lainnya	-	-	
Jumlah	344.000	3.529.710	(90,25)

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp4.122.011.813,00*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp4.122.011.813,00 dan Rp9.861.437.222,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	165.134.801	1.126.604.574	(85,34)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.535.600	7.398.000	(65,73)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	124.080.000	125.880.000	(1,43)
Beban Barang Operasional Lainnya	162.097.836	276.851.978	(41,45)
Beban Bahan	100.561.733	2.258.284.515	(95,55)
Beban Honor Output Kegiatan	2.216.200.000	3.138.887.000	(29,40)
Beban Barang Non Operasional lainnya	166.295.350	2.283.851.858	(92,72)
Beban Gedung dan Bangunan- Ekstrakomptabel	8.750.000		
Beban Langganan Listrik	196.738.392	226.468.000	(13,13)
Beban Langganan Telepon	7.166.298	20.949.748	(65,79)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	84.074.443	82.072.349	2,44
Beban Sewa	-	190.315.000	(100,00)
Beban Jasa Profesi	-	65.600.000	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	891.233.360	60.584.200	1.371,07
Jumlah	4.124.867.813	9.863.747.222	(58,18)
Pengembalian Beban Barang Oerasional Lainnya	-2856000	-2310000	23,64
Jumlah	4.122.011.813	9.861.437.222	(58,20)

Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya senilai Rp2.856.000,00 yaitu:

- Pengembalian Belanja Beban Jasa Lainnya Rp2.856.000.00.

Beban Pemeliharaan
Rp458.043.838,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp458.043.838,00 dan Rp1.187.300.455,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	293.358.290	664.215.163	-55,83
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	158.769.768	326.436.865	-51,36
Beban Pemeliharaan Jaringan	5.915.780	196.648.427	-96,99
Jumlah	458.043.838	1.187.300.455	-61,42

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas

Rp45.715.581,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp45.715.581,00 dan Rp3.500.474.676,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	45.715.581	2.128.380.771	-97,85
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	24.480.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1.348.700.745	
Beban Perjalanan Biasa- Luar Negeri	0	0	-
Jumlah	45.715.581	3.501.561.516	-98,69
Pengembalian Bel. Perjadin Biasa	0	1.086.840	
Jumlah	45.715.581	3.500.474.676	-98,69

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 adalah masing-masing senilai Rp0.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial Rp0

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1.702.418.904,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp1.702.418.904,00 dan Rp2.641.026.847,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	429.546.357	623.867.376	(31)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	472.634.024	470.884.024	0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	770.799.198	1.510.598.198	(49)
Beban Penyusutan Irigasi	15.284.987	24.722.487	(38)
Beban Penyusutan Jaringan	10.954.762	10.954.762	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak	3.199.576	-	-
Jumlah Penyusutan	1.702.418.904	2.641.026.847	(36)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp115.405,00*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp115.405,00 dan (Rp82.189).

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya	115.405	82.189	40,41
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	-
Jumlah	115.405	82.189	40,41

D.12 Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp9.005.180,00)*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset	8.820.000	32.687.016	
Pendapatan dari keg. Non operasional lainnya	185.180	-24.411.710	-100,76
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	9.005.180	8.275.306	

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp9.005.180,00, meliputi :

*Pos Luar Biasa
Rp.0*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp67.054.502.306,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp67.054.502.306 dan Rp68.603.908.417,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp53.859.302.921,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai (Rp53.859.302.921,00) dan (Rp64.444.083.748,00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang menambah/ Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar.

Koreksi- koreksi ini berdasarkan pada :

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp0 dan Rp0.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00) Koreksi Atas Reklasifikasi untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai (Rp0,00 dan Rp0,00,).

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,00*

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp8.656.006,00*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp8.656.006,00 dan (Rp11.701.840,00).

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi mengalami pembentukan Jurnal Otomatis karena adanya hibah Langsung dari pegawai berupa 7 (tujuh) rumah menjadi rumah negara.

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-Lain
Rp147.207,00*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp147.207,00 dan Rp17.446,00. Koreksi Lain terbentuk dari Jurnal Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang lainnya atas Kelebihan Bayar Tunjangan di tahun 2025.

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar Entitas
Rp52.458.288.529,00*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp52.458.288.529,00 dan Rp62.906.362.031,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Diterima dari Entitas Lain	(233.678.011)	-579.057.517
Ditagihkan ke Entitas Lain	52.372.216.540	63.017.235.548
Transfer Keluar	-	
Pengesahan Hibah Langsung	319.750.000	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	468184000
Jumlah	52.458.288.529	62.906.362.031

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan

belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025 dan 2024, DDEL senilai (Rp233.678.011,00) sedangkan DKEL senilai Rp52.372.216.540,00

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1			-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp. 0,00 dan Rp0,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung

entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp319.750.000,0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	PT. Pathemaang Raya	Gudang	Rp 100.000.000
		Coldstorage	Rp 75.000.000
		Pabrik Es	Rp 75.000.000
		Dermaga	Rp 60.000.000
		Rumah Adat	Rp 3.500.000
		Bengkel 1	Rp 2.500.000
		Bengkel 2	Rp 1.750.000
		Pos jaga	Rp 1.000.000
		Bak Air	Rp 1.000.000
Total Pengesahan			Rp 319.750.000
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp 319.750.000

E.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp65.662.291.127,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp65.662.291.127,00 dan Rp67.054.502.306,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/ MEN-KP/KU.611/2023 tentang Perubahan kelima puluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.2/BPPP.BTG/KPTS/KU.611/I/2025 tanggal 2 Januari 2025, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada satuan kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung ;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/BPPP.BTG/KPTS/KU.611/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada satuan kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung ;

Kuasa Pengguna Anggaran	: Natalia, S.St.Pi,.M.Pi
Pejabat Pembuat Komitmen	: Pungky Herlambang, S.Tr.Pi
Pejabat Penanda Tangan SPM	: Sri Widiyanti, S.Pi
Bendahara pengeluaran	: Odorita Naibaho, A.Md
Bendahara Penerimaan	: Jean Rotinsulu, S.Sos

Kegiatan pelatihan dilakukan oleh satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung per 31 Desember 2025 dilakukan dalam sistem Luring.